

The book cover has a dark, chalkboard-like background. It is decorated with various white line-drawn icons representing school subjects: an open book, a stapler, a backpack, a book, a protractor, a compass, a musical note, a rocket, a magnifying glass, a globe, an apple, a set square, and a paper airplane. The author's name is at the top, and the title is in the center.

HERLY JANET LESILOLO

demokrasi di Sekolah

DEMOKRASI DI SEKOLAH



Herly J. Lesilolo

Lahir di Ambon, 23 Januari 1971. Berdomisili dan menyelesaikan Pendidikan dasar hingga menengah di Ambon. Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Fakultas Teologi, Program studi Pendidikan Agama Kristen dan lulus dengan gelar S.Pd 1995. Kemudian, melaksanakan tugas sebagai asisten dosen di APGAKPN Ambon 1995-1997 dan diangkat sebagai dosen tetap di APGAKPN Ambon 1998. Selanjutnya melakukan studi S2 di Universitas (UM) Negeri Malang Program Studi Bimbingan dan Konseling, dan mendapat gelar Master Pendidikan 2003. penulis kembali mengabdikan diri di lembaga pendidikan yang sama tetapi telah beralih status menjadi STAKPN Ambon. Ketekunan meniti karier sebagai dosen justru membuka ruang untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Pendidikan dan berhasil meraih gelar Doktor Pendidikan 2015. Penulis aktif meneliti dan mendalami perkembangan dalam pendidikan.

DEMOKRASI DI SEKOLAH

Herly Janet Lesilolo

Cantrik

DEMOKRASI DI SEKOLAH
© Herly Janet Lesilolo, 2023

Penulis : Herly Janet Lesilolo
Editor : Kartika Nurul Nugrahini
Desain : Tim Cantrik

Diterbitkan oleh Cantrik Pustaka
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
✉ redaksi@cantrikpustaka.com
☎ 0812-1344-3842

Bekerja sama dengan
LPPM IAKN Ambon
Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Demokrasi di lingkungan sekolah/Herly Janet
Lesilolo —Yogyakarta: 2023
viii+89 hlm; 14 x 20 cm

Cetakan 1, Januari 2023
ISBN 978-623-139-002-8

Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
penulis, kecuali untuk keperluan sitasi



Gerai Cantrik



PRAKATA

Demokrasi di lingkungan sekolah bukan cara yang mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan perubahan keyakinan warga sekolah terhadap tindakan-tindakan demokratis yang berhubungan dengan kebebasan. Habitus sekolah perlu diubah menjadi lingkungan sosial agar terjadi pembiasaan pikiran dan tingkah laku demokratis yang ditandai dengan kepentingan mutualitas warga sekolah melalui interaksi yang fleksibel dan seimbang guna kepentingan bersama. Warga sekolah memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi secara utuh dengan penerapan nilai-nilai kebebasan yang kritis, setara, akuntabilitas, disiplin, dan kejujuran dalam tindakan.

Khususnya kegiatan belajar mengajar akan mengalami perubahan di mana proses belajar mengajar tidak terjadi secara konseptual. Siswa tidak hanya mendengar pengetahuan dari guru dan membaca sumber buku yang ditetapkan guru. Sebaliknya,

ide dan aktivitas kebutuhan siswa menjadi unsur utama yang tertuang dalam rencana pengembangan pembelajaran guru. Siswa menikmati kebebasan penuh untuk bertumbuh dalam belajar tanpa hambatan karena cara belajar dilakukan melalui kehidupan sosial yang nyata sehingga siswa bukan berpikir secara alami tentang sesuatu, tetapi melakukan sesuatu secara alami.

Buku *Demokrasi di Sekolah* dapat membantu pembaca menemukan makna demokrasi dalam pendidikan dan penerapan demokrasi secara praksis di sekolah. Penulis percaya bahwa setiap pernyataan dan gambaran dalam buku ini membutuhkan pemikiran dan penerapan yang lebih kritis sehingga kajian-kajian ilmiah dan praksis demokrasi yang terbaru dapat dirintis dengan tepat.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	v
Daftar isi	vii
1 Pendahuluan	1
2 Demokrasi dalam Pendidikan	13
3 Kebijakan Pendidikan yang Demokratis	33
4 Demokrasi di Sekolah: Kebebasan yang Bertanggung Jawab	43
5 Mengelola Kualitas Sekolah dalam Konteks Demokrasi	59

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah bersikukuh memfasilitasi kebiasaan bahwa siswa harus mendengar guru, tanpa ada ruang bagi siswa memberikan argumen yang berbeda dari sudut pandang guru. Bahkan sekolah dalam mencapai kualitas lebih menonjolkan reputasi hasil pada ijazah dengan nilai akademik yang tinggi. Dalam proses mencapai hasil akademik ada tekanan-tekanan, seperti komunikasi yang satu arah yaitu dari guru ke siswa, tidak ada umpan balik dari siswa, kebebasan kritis siswa masih dibatasi, dan masih ada fasilitas pembelajaran yang kurang memadai tetapi siswa dipaksakan harus memiliki nilai pengetahuan dan prestasi belajar yang tinggi. Sekolah masih mempraktikkan penindasan yang halus, seperti tidak adanya dialektika dan komunikasi yang terbuka, subjektivitas kadang muncul, komitmen etis yang dipaksakan, dan relasi kekuasaan yang tidak dapat dihindari.

Konteks di atas menggambarkan bahwa ruang sekolah telah mengabaikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berpartisipasi agar bertumbuh dan berkembang secara optimal dan wajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Dewey, 1916). Ada semacam regulasi otoritas di sekolah yang tanpa disadari telah melumpuhkan dan mematikan pengalaman belajar, ide-ide siswa, termasuk tidak adanya dukungan yang konsisten dengan aktivitas belajar yang mengembangkan ide dan gagasan dari siswa.

Regulasi otoritas dipakai dalam proses belajar mengajar agar nilai akademik siswa menjadi tinggi. Siswa dikungkung agar mudah dikendalikan dalam proses belajar mengajar. Struktur kurikulum pun diarahkan mempersiapkan siswa untuk sukses di tingkat berikutnya, tetapi tidak berbasis instruksional untuk praktik pendidikan dan proyeksi tentang kebutuhan masa depan yang memberi kontribusi bagi masyarakat. Orientasi sistem kesinambungan antara teori (pengetahuan) dan praktik dalam belajar mengajar kurang dioptimalkan, bahkan, integrasi kurikulum dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis belum termuat dengan jelas mengakibatkan kapasitas berpikir siswa menjadi lemah.

Sementara sikap guru agar konsisten dengan kurikulum justru mengakibatkan guru menjadi bingung karena materi pelajaran cenderung tambal sulam. Guru menerjemahkan isi kurikulum dengan mempersempit ruang demokratis sehingga melahirkan struktur sosial yang kurang adil. Harkat kemanusiaan

terlindungi dalam tekanan dan kondisi manusia meningkat tanpa kebebasan kritis dalam menyikapi berbagai masalah. Isi materi dalam kurikulum didominasi dengan tuntutan menghafalkan dan menguasai pelajaran sebanyak mungkin untuk menghadapi ujian dan siswa harus menjawab apa yang telah dihafalkannya.

Kondisi di atas sebenarnya terindikasi bahwa sekolah telah membuat manusia melepaskan tanggung atas perkembangannya sendiri, bahkan sekolah bisa disinyalir menjadi penyebab banyak orang bunuh diri secara spiritual (Illich, 1970). Bagi Dewey, pendidikan bukan hanya menuju kedewasaan, tetapi berkelanjutan pada pertumbuhan pikiran yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan yang sebenarnya adalah setelah meninggalkan bangku-bangku sekolah. Dengan demikian, pendidikan yang berlangsung di sekolah harus memberikan pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menampung kegiatan pendidikan dengan kesejahteraan yang maksimal adalah menerapkan sistem demokrasi yang didasarkan pada saling menghormati kepentingan bersama, kebebasan, dan sarana kontrol sosial. Dalam proses belajar, siswa diberi kebebasan mengeluarkan pendapat. Suasana belajar mengaktifkan siswa dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Begitu juga menciptakan suasana belajar mengajar sehingga siswa senantiasa termotivasi untuk terus belajar.

Lemahnya menerapkan demokrasi di sekolah dapat mengakibatkan komunikasi proses belajar mengajar hanya satu arah

dan tidak terjadi komunikasi umpan balik atau debat kritis antara guru dengan siswa atau sebaliknya. Guru pun menjadi subjektif dalam memberi penilaian dari segi keterampilan dan sikap siswa. Tidak salah jika ditegaskan bahwa setiap sudut sekolah tidak lagi kritis menumbuhkan keyakinan untuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam proses belajar mengajar terjadi perlakuan tidak adil bagi siswa karena siswa tereksklusi dari dunia pengalaman kritis untuk menghadapi berbagai pergolakan secara nyata.

Dampak lain jika unsur keadilan lemah di sekolah maka kebiasaan belajar siswa yang aktif atau pasif diapriori dengan sebutan anak pintar dan bodoh. Pintar bagi anak disebut anak baik, bodoh bagi anak disebutkan anak nakal. Layanan terhadap anak pintar/baik terus dioptimalkan, sementara layanan terhadap anak kurang pintar belum sepenuhnya dioptimalkan. Nilai solidaritas, kepercayaan, dan toleransi juga dapat menurun karena siswa tidak mengetahui apa tujuan belajar mereka.

Mirisnya, potensi demokratis di sekolah justru dianggap menjadi ancaman bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas sekolah. Karena ada juga semacam kebiasaan sekolah dalam kualitas proses belajar yang membentuk sikap pasif dan adaptif terhadap teks (buku pelajaran) dan konteks (realitas kehidupan) bagi siswa sehingga tidak terjadi dialektika ilmu pengetahuan. Arena proses belajar mengajar pun tidak lebih dari sekadar imposisi pengetahuan dari mereka guru kepada siswa yang dianggap tidak mengerti apa-apa. Bahkan berhasilnya penyampaian pengetahuan hanya melalui komunikasi satu

arah dan tidak ada komunikasi terbuka. Kultur sekolah seakan mempolakan perkembangan siswa melalui proses teknis-material sehingga menggeser ide tentang perkembangan diri siswa yang bersifat moral dan etis.

Kondisi yang tidak demokratis lainnya yaitu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan yang tergantung pada keputusan birokrasi. Terkadang kebijakan dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah cenderung menjadi subordinasi birokrasi di atasnya sehingga kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk meningkatkan kualitas sekolah sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian, dapat teridentifikasi bahwa selama ini demokrasi di sekolah hanya diyakini dan dipertontonkan saja, tetapi tidak dipraktikkan sebagai prosedur dalam proses belajar mengajar. Sekolah cenderung terkesan melumpuhkan dan membatasi penghargaan terhadap harkat, martabat, dan hak siswa. Sekolah melemahkan nilai-nilai demokrasi seperti, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Bahkan pelemahan nilai-nilai demokrasi ini telah dijadikan orientasi dalam proses belajar mengajar sebagai tindakan memperbaiki kualitas sekolah.

Cukup menyedihkan karena praktik demokrasi yang mengalami proses tarik-menarik demi kepentingan pemerintah sebagai penguasa terhadap sekolah. Sekolah seakan mengalami krisis

demokrasi karena pemerintah memberikan legitimasi kepada sekolah, tetapi sekolah tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan kecakapan (*skill*) yang cukup untuk mengelola praktik demokratis secara tepat. Pemerintah sebagai penguasa menuntut sekolah memenuhi keputusan dan kebijakan pemerintah. Akibatnya, sekolah menciptakan kultur sekolah yang mengandalkan kekuatan militer, tindakan diskriminatif, dan tidak menjunjung rasa hormat untuk mengembangkan kultur kepercayaan dan kebebasan kepada warga sekolah. Padahal warga sekolah memiliki hak untuk menolak keputusan pemerintah (penguasa) jika keputusan tersebut tidak memihak kepada kepentingan warga sekolah.

Secara ringkas dapat ditegaskan bahwa ada lima kebiasaan di lingkungan sekolah yang mematikan penerapan demokrasi.

1. Lingkungan sekolah masih melemahkan kepercayaan timbal balik. Momen berkumpul untuk membahas dan melakukan pertimbangan bersama belum sepenuhnya memberi penghargaan dan kepercayaan penuh kepada setiap individu di lingkungan sekolah. Kekuatan demokratis berupa kepercayaan telah dipaksa membenarkan dan menjalankan keputusan yang dibuat berdasarkan tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirinya lebih berkuasa dan lebih tahu.
2. Relasi dalam pengorganisasian kegiatan sekolah memperkecil interaksi, partisipatif, komunikatif, juga tidak bebas mencipta, bereksperimen, menganalisis, dan mengambil keputusan bersama. Peraturan yang ada di sekolah seakan-akan

memaksa siswa untuk pasif, perbuatan di sekolah berlangsung kaku, tidak memberikan kebebasan bertindak, bentuk bangku, gedung, rencana pelajaran, semuanya mengikat, tidak memberikan kebebasan kepada anak maupun guru.

3. Nilai keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan wewenang tidak utuh diberikan kepada setiap individu. Akibatnya, efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar belum mewujudkan interaksi edukasi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta dampak dari hasil kegiatan belajar mengajar yang hanya pada hasil yang berorientasi nilai.
4. Pembelajaran masih dengan sengaja dikelola untuk mempersempit ruang kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Guru lebih mendominasi karena guru yang merancang kegiatan belajar mengajar. Siswa tekun belajar secara konseptual sehingga perbuatan dan pikiran siswa tergantung pada orang lain, lisan dari guru, maupun tertulis dari buku. Siswa dipaksa untuk mengerjakan, untuk belajar atau untuk mencapai target nilai tertentu. Akibatnya, siswa menjadi tertekan dan dapat membuat siswa berpikir bahwa belajar adalah kewajiban, bukan kebutuhan.
5. Pihak-pihak eksternal, yaitu orang tua, masyarakat dan *stake holders* belum optimal dipakai sebagai pihak untuk berkon-sultasi dan menjadi motivator bagi upaya meningkatkan prestasi akademik siswa sekaligus memperbaiki kualitas sekolah.

Demokrasi di sekolah dalam buku ini lebih mendeskripsikan tentang mengoptimalkan praktik-praktik demokrasi dalam hubungan interaksi antara warga sekolah. Hubungan interaksi demokratis dapat mempolakan keyakinan, norma dan sikap partisipasi, akuntabilitas, kebebasan, dan kesetaraan (Gray & Chanoff, 1986). Norma dan sikap demokratis ini jika diyakini dan dilakoni dengan baik maka pada satu sisi dapat mencorakkan lingkungan sekolah yang menghargai kebebasan dan memotivasi setiap warga sekolah bergerak menuju derajat atau martabat yang lebih tinggi. Sementara pada sisi lain, dapat dijadikan karakteristik khas sekolah guna menyikapi keragaman suku, tingkat sosial, perilaku, sampai kepada bahasa di lingkungan sekolah. Keterlibatan warga sekolah dalam keragaman dengan interaksi demokratis diharapkan dapat mendekonstruksi stereotipe dan prasangka terhadap identitas lain di sekitar lingkungan sekolah.

Selanjutnya, dalam konteks proses belajar mengajar hubungan interaksi demokratis melalui keyakinan, norma dan sikap partisipasi, akuntabilitas, kebebasan, dan kesetaraan akan membantu siswa berbagi tanggung jawab dan belajar untuk bekerja sama, menghindari adanya hubungan otoriter antara guru dan siswa, mengembangkan pemikiran kritis siswa, siswa bebas untuk mengatur pembelajaran, mengembangkan kompetensi dan guru selalu berusaha meningkatkan harga diri siswa dan mengurangi kerasnya ketidakadilan sosial di sekolah.

Agar hubungan interaksi demokratis ini dapat diberdayakan maka guru adalah tokoh yang lebih dulu perlu melakukan peru-

bahan dalam kultur, karena gurulah yang perlu mengubah cara belajar mengajarnya dengan siswa (Herderson, 2001). Guru dapat melakukan praktik dan prosedur demokratis sehingga menghargai dan mengusahakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi siswa serta menghargai kebebasan siswa sebagai manusia yang bermartabat dalam kemanusiaannya. Guru berusaha melakukan keadilan dan kesetaraan untuk sedapatnya mengurangi perilaku diskriminatif yang tidak menguntungkan bagi setiap individu di lingkungan sekolah dan menghindari munculnya eksklusivisme yang dapat ditimbulkan dari keyakinan bahwa secara kodratnya rasnya lebih tinggi atau secara ekonomi memiliki kehidupan yang layak dibandingkan dengan yang lain.

Siswa diterima sebagai individu yang memiliki naluri dan kekuatan terhadap semua materi yang akan diterima guru. Guru dapat menciptakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang terhubung dengan kegiatan inisiatif indepeden seperti, pengalaman nyata di lingkungan sosial yang setara dengan perkembangan siswa, sehingga ada wawasan ke dalam stuktur psikologis yang memengaruhi pencapaian prestasi akademik siswa (Dewey, 1998). Proses belajar mengajar lebih diarahkan untuk siswa yang dimanusiakan, memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal siswa, belajar sambil bekerja sehingga siswa mampu berpikir kritis.

Selanjutnya praktik-praktik demokrasi perlu dipahami bukan sebagai suatu ide belaka, tetapi sebagai penggabungan nilai dan sikap yang didasari keyakinan. Warga sekolah seharusnya dapat

memiliki itikad baik mempraktikkan komunikasi yang terbuka, memberi pertimbangan, memahami perbedaan, membuat kesepakatan, termasuk memperjuangkan komitmen sekolah untuk berlaku adil di semua poros pendidikan. Kultur seperti ini dapat dijadikan jalan masuk, juga solusi dan prinsip dalam memperbaiki kualitas sekolah (Raharjo, 2012). Solusi dan prinsip memperbaiki kualitas sekolah melalui perilaku demokratis yang dimunculkan secara terus-menerus di sekolah akan membentuk kesadaran warga sekolah bahwa, tidak ada pihak manapun yang lebih mendominasi proses perbaikan kualitas dan tidak ada kelompok atau pribadi yang merasa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan berhak menentukan proses pendidikan di sekolah.

Makna menerapkan demokrasi di sekolah tidak cukup jika mengatakan bahwa demokrasi hanya untuk menghindari indoktrinasi, otoriter, dan eksploitasi. Namun, warga sekolah didorong untuk berunding, berkompromi, dan bekerja sama di dalam suatu keanekaragaman, menerima perbedaan satu dengan yang lain, berdebat secara damai, dan berdiskusi untuk mencapai satu kesepakatan bersama.

Demokrasi dapat dijadikan visi yang berani menentang asumsi bahwa hanya orang-orang yang mampu dan matang secara fisik dan ekonomi yang memiliki kesempatan mendapat layanan pendidikan yang baik dan unggul atau berkualitas. Cakupan perilaku demokratis lain yang mempertalikan perbedaan dan keragaman yang ada pada warga sekolah tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, termasuk

perlakuan yang sama dalam bidang apa pun tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, kekayaan, suku bangsa, dan lainnya.

Artinya, penerapan demokrasi di sekolah lebih memberi penghargaan kepada kemanusiaan untuk bebas, bertanggung jawab, bekerja sama secara sukarela, hidup setara tanpa tuan dan budak. Warga sekolah mengoptimalkan norma dan perilaku mengurangi kesenjangan kualitas bagi mereka yang mungkin mengalami ketimpangan karena ras, kelas sosial, tempat tinggal, agama kepercayaan atau sejenisnya dan mengoptimalkan kehidupan demokratis dengan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan.

Tinjauan lebih dalam tentang demokrasi di sekolah selanjutnya akan direkonstruksi dalam teori-teori pendukung antara lain, (1) makna demokrasi dalam pendidikan, (2) kebijakan pendidikan yang demokratis, dan (3) demokrasi yang meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1992. *Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Aspin, D.N. and J.D. Chapman. 1994. *Quality schooling*. School Development Series, Redwood Books.
- Barnes, F.D. 2004. *Inquiry and action. Making school improvement part of daily practice*. Senior Associate Annenberg Institute for School Reform at Brown University
- Blagojevich, R.R., Illinois Capital Development Board, & Illinois State Board of Education. 2006. *Illinois resource guide for health, high performing school buildings*. IL, Healthy Schools Campaign.
- Brady, P. 2009. *Working towards a model of secondary school culture*. Lakehead University: Faculty of Education.
- Brighouse, H. 2006. *On education*. London: Routledge.

- Brummet, A.J. 1989b. *Policy directions: A response to the Sullivan Royal Commission on Education by the Government of British Columbia*. Vancouver: Ministry of Education.
- Catalano, R. F. et al. 2004. Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591, 98-124.
- Cavanagh, R. F., & G. B. Dellar. 1998. *The development, maintenance and transformation of school culture*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association.
- _____. 2003. *Organisational and learning community conceptions of schools: Implications for understanding and research school improvement*. New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Cheah, L. et al. 2011. Democratic leaders empower teachers job satisfaction? The Malaysian Case School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia 11800 Penang. *International Journal of Business and Social Science*. 10. 251-270.
- Crippen, C. 2005. The democratic school: First to serve, then to lead. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy. Issue*, 47, 1-17.
- Cole, G.A. 1995. *Management theory and practice* (5th ed.). London: DP Publications.
- Coleman, J. S. 1988. Social capital in the creation of human capital. *The American Journal of Sociology*. 94. 95-120.

- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Business research methods* (th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Creemers, B.P.M. 1996. The goals of school effectiveness and school improvement. In D. Reynolds, R. Bollen, B. Creemers, D. Hopkins, L. Stoll, & N. Lagerweij, *Making good schools*. London/New York: Routledge.
- Dalton, R.J., & D.C. Shin, & Jou W. 2007. Understanding democracy: Data from unlikely places. (Versi electronic). *Journal of Democracy*, 18, 5, 143–156.
- Darmodiharjo, D. 1978. *Pancasila. Suatu orientasi singkat: dilengkapi dengan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Ketetapan MPR no II/MPR 1978*.
- Deal, T.E., & K.D. Peterson. 1999. *Shaping school culture*. San Fransico: Jossey-Bass.
- Dunca, A. 2014. *Guiding Principles: A Resource Guide for Improving School Climate and Discipline*. Washington, D.C
- DECS (Department of Education and Children's Services). 2007. *School Discipline*.
- _____. 1987. My pedagogic creed. John Dewey's famous declaration concerning education. First published in *The School Journal*. (versi 76). The school and society. In: *middle works of John Dewey*. Carbon electronic) 3,16, 77–80.
- Dewey, John. 1998. Search for the Great Community—*The Essential Dewey: Pragmatism, Education, Democracy, Volume 1*. Edited by Larry A. Hickman and Thomas M. Alexander. Indiana University Press pp 293–307.

- Dewey, John. 1998. The Moral Training Given by the School Community – *The Essential Dewey: Pragmatism, Education, Democracy, Volume 1*. Edited by Larry A. Hickman and Thomas M. Alexander. Indiana University Press pp 246–249.
- Dewantara, K.H. 1977. *Pendidikan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- _____. 1994. *Kebudayaan II*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Deal, T. E., & Kennedy, A.A. 1999. *The new corporate cultures: Revitalizing the workplace after downsizing, mergers and reengineering*. New York, NY: Perseus.
- Deal, T.E. & Peterson, I.C.D. 2002. *Shaping school culture field book*. San Francisco: Jossey-Bass.
- _____. 1998. How leaders influence the culture of schools. *Education Leadership*, 56, 28–30.
- Deuchar, R. 2003. Preparing tomorrow's people: the new challenges of citizenship education for involving Scottish pupils and teachers in participative decision-making processes. *Scottish Educational Review*, 35, 27–37.
- Drackner, M., & G. Subramahnyam. 2010. *Educational investment and democratic development a theoretical and empirical overview*. Report commissioned by Sida and produced under contract with Hifab International.
- Donald, A. 1997. Defining educational quality. *Educational Planning* 9, 3–18.

- Dunstan, J. 1995. *The structure of democracy in educational settings: the relationship between the school and the system.*
- Earthman, G.I. 2004. *Prioritization of 31 criteria for school building adequacy.* Baltimore, MD: American Civil Liberties Union Foundation of Maryland.
- Easton, L. B. 2005. Democracy in schools: Truly a Matter of Voice. *The English Journal*. 94, 52-56.
- _____. 2001. *Deliberativa samtal som värdegrund–historiska perspektiv och aktuella förutsättningar. [Deliberative communication as a value foundation–historical perspective and current preconditions].* Stockholm: Skolverket.
- Evans, G., & R. Pauline. 2007. *Education and support for democracy in Sub-Saharan Africa: Testing mechanisms of Influence.* Afrobarometer Working Paper 75. Capetown, SA: Afrobarometer.
- Frey, L., C. Botan & G. Kreps. 1999. *Investigating communication: An introduction to research methods.* (2nd ed.) Boston: Allyn & Bacon.
- Gillies, R M. and Carrington. 2004. Inclusion: Culture, Policy and Practice: A Queensland Perspective. *Asia Pacific Journal of Education* 24, 117–128.
- Glaser, B. G., & A. Strauss. 1967. *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.* Chicago: Aldine.
- Gray, P. & Chanoff, D. 1986. 'Democratic schooling: what happens to young people who have charge of their own education?.' *American Journal of Education* . 94, 182-213.

- Gutmann Amy. 1999. *Democratic Education*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hastomo. 2006. *Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang*. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Yogyakarta.
- Herderson, J.G. 2001. Deepening democratic curriculum Work. *American Educational Research Associatio*, 30, 18-21.
- Hoy, W.K. 1990. Organizational climate and culture: A conceptual analysis of the school workplace. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 1,2.149-168.
- Hurn, C. J. 1993. *The limits and possibilities of schooling: An introduction to sociology of education* (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Illich, Ivan. 1971. *Descholling Society*. New York: Harper & Row.
- Israil, I. 2005. *Pendidikan pembelajaran dan penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- Jorgensen, D.L. 1989. *Participant observation*. New Delhi: SAGE Publication.
- Komariah, A., dan Triatna C. 2008. *Visionary leadership menuju sekolah efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kosnoski, J. 2005. Artful discussion: John Dewey's classroom as a model of deliberative association. *Reviewed Political Theory*, 33, 654-677.

- Kouzes, J.M., & B.Z. Posner. 1995. *The leadership challenge: How to keep getting extraordinary things done in organizations (2nd ed.)*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kuen, T.K. 2009. Three approaches to understanding and investigating the concept of school culture and school culture phenomena: implications to school improvement and school effectiveness. *Hong Kong Teachers' Centre Journal*.8, 86-105.
- Lee C, et al. 2011. How democratic leaders empower teachers job satisfaction? The Malaysian case. *International Journal of Business and Social Science*, 10, 110-125.
- Liontos, L. B. 1994. Shared decision-making. *ERIC Clearinghouse on educational management eugene OR*.
- Lunenburg, F. E. 1995. *The principalship: Concept and application*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Lunenburg, F.E & Ornstein, A.C. 2000. *Education administrations: Concept and practice*. Buckingham and Philadelphia: Open University Press.
- Masland, T. A. 1985. Organizational culture in the study of higher education. *The Review of Higher Education*, 8, 157-168.
- McLean L., M. Fairman, and B. Moore. 2006. A system approach to charting a path to quality and achievement. *Report no. 1 to the The Council of Chief School Officer's* (Successful Practices Series).

- Miles, M.B. & A.M. Huberman. 1992. *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. SAGE: Beverly Hills.
- Msila, V. 2007. From apartheid education to the revised national curriculum statement: Pedagogy for identity formation and nation building in South Africa. *Nordic Journal of African Studies*, 16, 146–160.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif: Edisi revisi*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya.
- Moller, J. 2005. Framing successful school leadership as a Moral mand democratic enterprise. *Education Research and Perspectives*, 32, 1–14.
- Morgan, G. 1986. *Images of organization*. London: Sage.
- Muhadjir, N. 2011. *Metodologi penelitian. Paradigma positivisme objektif fenomenologi interpretif logika bahasa platonis, chomsyist, hegelian dan hermeunetik. Paradigma studi Islam matematik recursion-, set-theory & structural equation modeling dan mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- _____. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphisik telaah studi teks dan penelitian agama*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- _____. 2004. *Metodologi penelitian kebijakan evaluation research integrasi penelitian, kebijakan, dan perencanaan*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- _____. 1993. *Metodologi peneltian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- National Education Association National. 2008.
- National Council for the Social Studies. 2004. National Council for the Social Studies curriculum guidelines. *Social Education*. 68, 291-292.
- Neuman, W. L. 2006. *Basics of social research: Qualitative and quantitative approaches*. Paperback, Revised.
- Nock, S.A. 1942. John Dewey's vision education today by John Dewey (versi elektronik). *The Sewanee Review*, 50, 128-130.
- Nudzor, H. 2009. What is "policy", a problem-solving definition or a process conceptualisation? *E-journal of the British Education Studies Association*. 2. 85-96.
- Ogburu, I. 2008. *Educational policy and standars: A key to a poductive economy*. Being a paper presented at the 2008 National Conference on Improving Educational Standars in Nigeria. Faculty of Education, University.
- Owlia, M. S., & E. M. Aspinwall. 1996. A framework for the dimensions of quality in higher education. *Quality Assurance in Education*, 4, 12-20.
- Parker, W.C. 2003. *Teaching democracy: Unity and diversity in public life*. New York, NY: Teachers College Press
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Patrick, J.J. 1996. Civil society in democracy's third wave: Implications for civic education, in *Social Education*, 7, pp. 414-417.

- Peterso, K.D. & T.E. Deal. 2009. *The shaping school culture*. Seconde edition. San Fansisco: Published by Jossey-Bass.
- Preskill, S, L. Vermilya & G. Otero. 2000. *Skills for democracy: Promoting dialogue in schools*. Melbourne: Hawker Brownlow Education.
- Preskill, S. 2003. Mary Parker Follett and the democratic imperative: Probing the connection between civic engagement, “power-with” leadership, and lifelong learning. *Scholar-Practitioner Quarterly*, 13, 5–19.
- Raharjo, S.B. 2012. Evaluasi *trend* kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16, 298–319.
- Ramavath, P.J & Y.J. Ravindraprakash. 2010. Discoursing discipline in Indian schooling system. *Jurnal IERJ*.
- Robbotom, I. 2004. Constructivism in environmental education: Beyond conceptual change theory. *Australian Journal of Environmental Education*. 20, 93–102.
- Rogoff, B. 2003. *The cultural nature of human development*. Oxford: Oxford University Press.
- Rousseau, D. M. 1990. Assessing organizational culture: The case for multiple methods. In B. Schneider (Ed.), *Organizational climate and culture* (pp. 153–193). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Roth, K. 2006. Deliberation in national and post-national education. *Journal of Curriculum Studies*, 38, 569–589.
- Said, A. 2009. *Negara Pancasila jalan kemaslahatan berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

- Saifuddin, A. 2009. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Senge, P. M. 1990. *The fifth discipline*. New York, NY: Doubleday-Dell.
- _____. 1992. *Organizational Culture and Leadership* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Schmuck, R. A., & P. J. Runkel. 1994. *Handbook of organization development in schools and colleges*. Prospect Heights, Ill: Waveland.
- Silalahi, U. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Soenarya E. 2000. *Pengantar teori perencanaan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant observation*. New York: Holt. Rinehart and Winston.
- Steyen, J. 2000. *Balancing quality and equality in educational transformation*. Makalah disajikan dalam The conference *The Democratic Transformation of Education in South Africa*, University of Stellenbosch's Department of Educational Policy Studies, di South Africa.
- Stoll, L. 1999. School culture: Black hole or fertile garden for school improvement. in: J. Prosser (Ed.), *School culture. British Educational Management Series*. London: Sage Publications.
- Sullivan. W.M. 1996. The public intellectual as transgressor? *Higher Education Exchange*. 17-22.
- Suyata. 1998. Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan, Pidato Dies Natalis XXXIV Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta pada 23 Mei 1998.

Swan, J., & H. Scarbrough. 2005. The politics of networked innovation. *Human Relations*. 58. 913-943.

Taylor, S.J. & R. Bodgan. 1988. *Introduction to qualitative research methods: The search for meanings*. New York: John Wiley & Sons.

Thaman, K.H. 2009. Towards cultural democracy in teaching and learning with specific references to Pacific Island Nations (PINs). *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*. 3, 1-9.

Tesfamariam, T. 1993. Democratic School Practice in Eritrea (Unpublished Certificate of Education Essay, (versi electronic), University of Birmingham.

Tholander, M. 2007. Students- participation and non-participation as a situated accomplishment. *Childhood*, 14, 449-466.

_____. 2007. Working with rules: Lived democracy in school. *Ethnography and Education*, 2, 4. 109-126.

Thornberg R. 2010. School democratic meetings pupil control discourse in disguise. *Teaching and Teacher Education*, 26, 924-932.

UNESCO. 2005. *EFA Global Monitoring Report 2005: Education for All—The Quality Imperative*. Paris: UNESCO.

_____. 2013. *UNESCO handbook on education policy analysis and programming*. Bangkok: UNESCO Bangkok.

- Wenger, E., R. A. McDermott, & W. Snyder. 2002. *Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge*. Cambridge, MA: Harvard Business Press.
- Wrigley, T. 2003. Is school effectiveness anti-democratic. *Journal of Educational Studies*. 51, 89-112.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokratisasi. Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf.
- _____. (2001). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf